

## Analisis Efektivitas Program Bantuan Sosial di Kota Tanjungpinang

Imelda Eka Maulia \*<sup>1</sup>  
Nur Rahmania Zakiya <sup>2</sup>  
Selvira Aryani <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi: Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

\*e-mail : [Mauliaimel01@gmail.com](mailto:Mauliaimel01@gmail.com) , [nurrahmania560@gmail.com](mailto:nurrahmania560@gmail.com) , [selviraaryanii01@gmail.com](mailto:selviraaryanii01@gmail.com)

### Abstrak

Masalah penelitian ini adalah angka kemiskinan Kota Tanjungpinang semakin naik pada tahun 2023, yakni 7,95% menurut data Badan Pusat Statistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas program bantuan sosial pada masyarakat Kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah memberikan bantuan sosial seperti PKH, DTKS dan jenis bantuan lainnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, efektivitas pemberian bantuan sosial ini masih belum efektif bagi masyarakat Kota Tanjungpinang, yang mana angka kemiskinan naik dari tahun sebelum.

**Kata Kunci:** Bantuan Sosial, Efektivitas, Kemiskinan, Tanjungpinang.

### Abstract

The problem of this research is that the poverty rate in Tanjungpinang City is increasing in 2023, which is 7.95% according to data from the Central Statistics Agency. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of social assistance programs in the Tanjungpinang City community. The Tanjungpinang City Government has provided social assistance such as PKH, DTKS and other types of assistance. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques, namely by using literature studies. Based on the results of the research conducted, the effectiveness of providing social assistance is still not effective for the Tanjungpinang City community, where the poverty rate has increased from the previous year.

**Keywords:** Social Assistance, Effectiveness, Poverty, Tanjungpinang.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi masalah kritis yang memengaruhi persoalan di berbagai wilayah, baik di tingkat nasional maupun lokal (Perdana et al., 2023). Tantangan ini bukan hanya yang relevan saat ini, melainkan telah lama menjadi persoalan sosial dan ekonomi. Meskipun berbagai kebijakan publik bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan dalam situasi tertentu, angka tersebut dapat kembali naik karena adanya pengaruh eksternal maupun internal, seperti ketidakstabilan ekonomi, bencana, atau ketidakmerataan akses terhadap sumber daya. Penurunan kemiskinan juga dapat membuat angka kembali menaik (Dwi Astuti, 2019). Secara global, kemiskinan yang diakui sebagai masalah utama yang terus mendapatkan sorotan.

Menurut (Sinurat, 2023) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan isu multidimensi yang sulit diatasi, khususnya dalam lingkup global saat ini. Fenomena ini tidak terbatas pada negara yang berkembang atau terbelakang, tetapi juga dialami oleh negara-negara maju yang masih menghadapi ketimpangan ekonomi di beberapa wilayah. Tidak diragukan lagi, kemiskinan telah menjadi hal yang menonjol bukan hanya saat ini. Sebelum menjadi sorotan dunia, kemiskinan sebenarnya telah lama menjadi tantangan serius yang memerlukan intervensi pemerintah (Adawiyah, 2020).

Faktor utama yang memicu kemiskinan meliputi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air minum layak, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang memadai. Selain itu, hambatan struktural dan sistemik turut memperburuk kondisi kelompok rentan. Lebih dari sekadar masalah domestik, kemiskinan juga merupakan persoalan global yang memerlukan kerja sama antar negara. Seperti dikatakan (Yusnike Yusnike, 2024). Kemiskinan adalah krisis kemanusiaan yang membutuhkan solusi bersama, baik melalui bantuan internasional, perubahan kebijakan, maupun pembangunan berkelanjutan.

**Tabel Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau  
Periode 2013-2022**

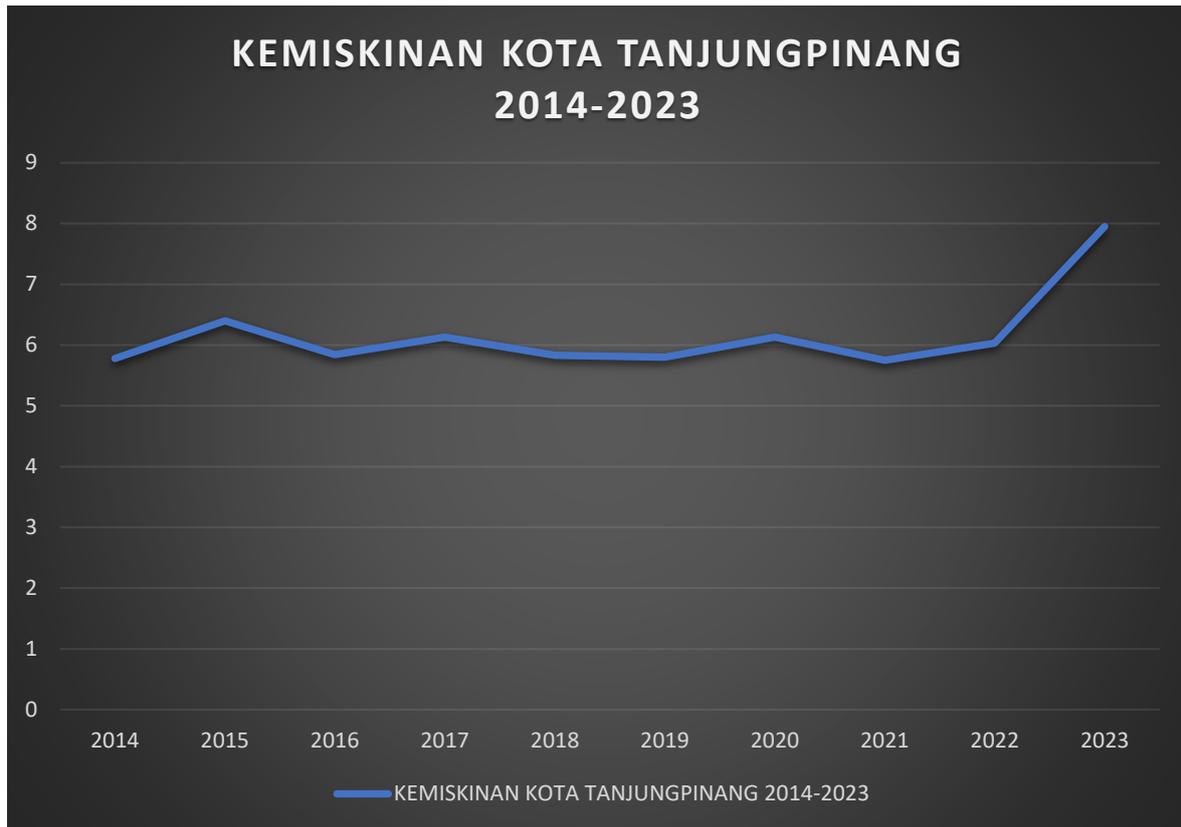
TAHUN	TINGKAT KEMISKINAN
2014	5.78%
2015	6.40%
2016	5.84%
2017	6.13%
2018	5.83%
2019	5.80%
2020	6.13%
2021	5.75%
2022	6.03%
2023	7,95%

**Sumber:** Badan Pusat Statistik

Dari data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistika, bahwa angka kemiskinan di Kepulauan Riau mengalami inkonsisten, mengapa demikian apa yang terjadi? Oleh karena itu, sulitnya di lapangan pekerjaan yang didapatkan serta daerah kepri sendiri memang tidak terlalu banyak indsutri yang ditemui, mungkin paling banyak yang ada di kota Batam. Kemudian pada tahun 2020 memperngaruhi angka karena kondisi pandemic yang melanda dunia. berikut ulasannya:

1. Lapangan pekerjaan yang susah
2. Kondisi pandemic 2020
3. Tingkat pendidikan yang rendah
4. Kawasan yang sangat ramai

Jika dilihat dalam bentuk grafik, berikut gambaran Kemiskinan di Kota Tanjungpinang.



**Gambar1.1**  
**Grafik Kemiskinan Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2023**

Sumber: Data Olahan (2024)

Sebanyak 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Tanjungpinang menerima bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Bantuan ini disalurkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di empat kecamatan di Tanjungpinang.

Berdasarkan fenomena diatas, menjadi alasan peneliti untuk mengetahui bagaimana efektivitas bantuan sosial di Kota Tanjungpinang.

**METODE**

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. (amtai, 2021) metode penelitian kualitatif adalah metode yang menggunakan persepsi dan analisis. Teknik pengumpulan penelitian ini adalah studi pustaka, melihat penelitian terdahulu dan melalui situs resmi dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pengambilan data dilaksanakan melalui kajian literatur yang meliputi tinjauan terhadap jurnal akademis, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi dari Pemerintah Kota Tanjungpinang.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tanjungpinang**

Menurut situs resmi pemerintah Kota Tanjungpinang Sebanyak 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Tanjungpinang menerima bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Bantuan ini disalurkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di empat kecamatan di Tanjungpinang.

Pemko Tanjungpinang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 550 ribu kepada masyarakat yang tidak mampu, Senin (4/12/2023). Penyaluran BLT yang langsung

diserahkan oleh Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, S.Sos secara simbolis itu diawali di Aula Kantor Camat Tanjungpinang Kota. Ada sebanyak 1.521 yang menerima bantuan tunai tersebut.

Kemudian tahun 2024, Kembali melaksanakan program bantuan sosial. Rincian penerima bantuan di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut, Kecamatan Bukit Bestari 1.013 KPM, Kecamatan Tanjungpinang Timur 1.897 KPM, Kecamatan Tanjungpinang Kota 999 KPM, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat 1.091 KPM pada tahun 2024.

Menurut Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022, Kepala Keluarga yang terdaftar dalam DTKS yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 46/HUK/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin dan rentan sosial di daerah yang terdaftar pada DTKS;
- b. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Honorer/PTT, anggota
- c. TNI/POLRI, BUMN/BUMD, Pensiunan ASN, TNI/POLRI, BUMN/BUMD;
- d. bukan merupakan penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN berupa:
  1. Program Keluarga Harapan.
  2. Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai, dan
  3. BLT bahan bakar minyak.
- e. nama yang mewakili dalam KK penerima manfaat harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- f. Bersedia menerima BLT dalam rangka pengendalian inflasi Daerah Tahun 2022.
- g. Bagi calon KPM yang menolak BLT sebagaimana dimaksud pada huruf e, membuat surat pernyataan menolak bantuan.
- h. Format surat pernyataan menolak bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf f tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pada pasal 4 peraturan ini menjelaskan

- 1) BLT diberikan dalam bentuk uang tunai.
- 2) (2) Penerima BLT, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- 3) (3) Besaran BLT adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per KPM per bulan untuk periode bulan Oktober 2022 dan bulan November 2022 dengan teknis pembayaran sekaligus paling lambat bulan Desember 2022

### **Efektivitas Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tanjungpinang**

Menurut (Hakim et al., 2024) Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengurangan Kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi salah satu program unggulan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial (Dinsos) Tanjungpinang, program PKH telah memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM). Pada tahun 2023-2024, PKH berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 15,02%, dengan lebih dari 1.500 keluarga di daerah ini menerima bantuan tunai yang diberikan secara berkala. Di Tanjungpinang, bantuan PKH digunakan oleh sebagian besar keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan anak, pengobatan ibu hamil, dan pemenuhan gizi keluarga. Penggunaan bantuan ini, terutama di daerah perdesaan, telah membantu menurunkan angka ketidakekolahan anak-anak dan mengurangi tingkat angka kematian ibu dan anak. Sebagai contoh, di beberapa desa di Kabupaten Bintan yang berdekatan dengan Tanjungpinang, banyak ibu hamil yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan kesehatan, kini mendapatkan pemeriksaan rutin berkat bantuan PKH.

Pada penelitian ini disebutkan bahwa, Berdasarkan hasil kajian tentang sejauh mana program bantuan sosial berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanjungpinang, dapat dikatakan bahwa program-program yang dilaksanakan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), ATENSI, dan proyek-proyek lain yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota

Tanjungpinang, telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan. Populasi rentan yang paling terdampak oleh kemiskinan—ibu hamil, anak kecil, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas—telah secara efektif menjadi sasaran inisiatif-inisiatif ini. Namun meskipun angka kemiskinan telah menurun secara signifikan di daerah pedesaan, masih terdapat kendala yang harus diatasi dalam pelaksanaan program, khususnya di daerah metropolitan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah metropolitan, yang tetap terhambat oleh tingginya biaya hidup dan ketimpangan dalam akses terhadap layanan sosial dan pendidikan, meskipun mereka telah meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program bantuan sosial telah membantu menurunkan kemiskinan, perubahan kebijakan yang lebih tepat sasaran masih diperlukan untuk daerah metropolitan yang menghadapi masalah kemiskinan sistemik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program bantuan sosial di Kota Tanjungpinang masih belum optimal. Meskipun berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan bantuan pangan telah disalurkan kepada masyarakat, angka kemiskinan justru meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan program, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan distribusi bantuan. Selain itu, kendala lainnya seperti rendahnya akses terhadap pekerjaan dan pendidikan juga turut memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah ini.

Sebagai rekomendasi, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program bantuan sosial yang telah dilaksanakan. Peningkatan akurasi data penerima manfaat, penguatan monitoring dan evaluasi program, serta sinergi dengan sektor lain seperti pendidikan dan ekonomi menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan sosial dapat lebih efektif mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, program bantuan sosial diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan\_Dan\_Penyebabnya*. 1(April), 43–50.
- amtai. (2021). *metode penelitian kualitatif* (shara (ed.); 1st ed.). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf)
- Dwi Astuti, D. B. S. (2019). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR Pendekatan Spasial. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2020(1), 473–484.
- Hakim, A., Badjo, A., Hastul, A., Wibowo, M., & Afin, A. S. (2024). *Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kota Tanjungpinang*. 4(1), 1033–1042. <https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/5000-kpm-di-tanjungpinang-terima-bantuan-sosial-dari-pemprov-kepri>
- <https://tanjungpinangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMjMg==/persentase-penduduk-miskin.html>
- Perdana, Y. K., Akbar, D., & Pratama, R. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals ( SDGs ). *Doktrin: Jurnal Dunia ...*, 1(3). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/1060%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/download/1060/1109>
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>